

D. Program Strategis

Berdasarkan hal-hal di atas ditetapkan 7 program strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Kondisi Sosial Ekonomi dan Fisik Kota
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
3. Pengembangan Kesempatan Kerja dan Berusaha
4. Reformasi Aparatur
5. Peningkatan Keuangan Daerah
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan
7. Peningkatan Transportasi Kota

E. Uraian Program Strategis

1. Rehabilitasi Kondisi Sosial Ekonomi dan Fisik Kota

a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perekonomian

1) Masalah Pokok

Rusaknya/terbakarnya sarana dan prasarana fisik/perekonomian kota.

2) Sasaran/Target

Pulih dan beroperasinya sarana dan prasarana fisik/perekonomian kota.

3) Kegiatan

a) Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik/perekonomian dengan melibatkan sektor swasta.-

b) Pemberian kemudahan pelayanan perijinan rehabilitasi sarana dan prasarana.

b. Rehabilitasi Sistem Distribusi

1) Masalah Pokok

Terganggunya distribusi barang dan jasa.

2) Sasaran/Target

Pulihnya rantai distribusi barang dan jasa ke sentra-sentra perdagangan kota.

3) Kegiatan

a) Perbaikan pembangunan jaringan distribusi dengan

melibatkan sektor swasta.

- b) Peningkatan kondisi usaha ekonomi kota yang kondusif/ aman.
- c) Pemberian bantuan pencarian modal kerja bagi usaha yang terkena dampak kerusakan.

c. Rehabilitasi Dampak Sosial dan Moral

1) *Masalah Pokok*

- a) Masih menonjolnya sikap emosional masyarakat yang dapat mengarah kepada perilaku destruktif.
- b) Masih adanya rasa tidak aman bagi pelaku' kegiatan ekonomi dalam menjalankan usahanya.

2) *Sasaran/Target*

- a) Meningkatnya kondisi moral masyarakat sehingga tidak mudah terpancing melakukan tindakan yang destruktif.
- b) Meningkatnya rasa persatuan dan kerukunan serta rasa aman masyarakat Jakarta.

3) *Kegiatan*

- a) Peningkatan kegiatan penyuluhan baik secara formal maupun informal.
- b) Peningkatan kegiatan keamanan swakarsa.
- c) Penyediaan sarana pengamanan disetiap pusat kegiatan ekonomi.
- d) Pemberian kemudahan pelayanan penggantian dokumen yang terbakar/rusak.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. ARAH KEBIJAKAN

Perjalanan pembangunan Propinsi DKI Jakarta mengalami pasang surut yang cukup panjang. Berdasarkan penggalan waktu (periodisasi), perjalanan pembangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Periode 2001, masa penyembuhan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, dengan program utama perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung bergeraknya kembali roda perekonomian Propinsi DKI Jakarta, disebut juga Rescue-Recovery Program.
- b. Periode 2002-2004, masa pemulihan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, penegakan supremasi hukum dan peningkatan ketertiban umum, dengan program utama perbaikan infrastruktur sosial-ekonomi dan peningkatan pelayanan publik, disebut juga Recovery Program.
- c. Periode 2005-2007, masa pemantapan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM dengan program utama penguatan fundamental sosial dan ekonomi menuju pada kemandirian, kesejahteraan dan berkelanjutan, disebut juga Stabilization Program.

Berdasarkan perjalanan pembangunan, fakta dan keadaan, serta permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan masyarakat dalam membangun kotanya, dapat dirumuskan arah dan kebijakan umum pembangunan Propinsi DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Arah Pembangunan Propinsi DKI Jakarta 2002-2007

- a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan infrastruktur sosial politik dan ekonomi serta pemeliharaan sarana dan prasarana kota.
- b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan berkelanjutan.

2. Pokok Kebijakan Pembangunan Propinsi DKI Jakarta 2002-2007

- a. Menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum dan budaya hukum.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel.
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan, aset dan usaha daerah dalam rangka peningkatan kemandirian daerah.
- d. Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi, dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- e. Mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peran serta usaha mikro, UKM dan koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan daya saing produk.
- f. Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka wajib belajar 9 tahun, pemerataan pendidikan dan pemerataan pelayanan kesehatan.
- g. Meningkatkan pengendalian penduduk dan sumber daya tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan produktivitas masyarakat.
- h. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial dan tawuran massa.
- i. Meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian PMKS, penyalahgunaan narkoba dan tawuran pelajar.
- j. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengendalian produksi, pengendalian konsumsi dan pengendalian aktivitas yang kurang ramah lingkungan.
- k. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan daya dukung kota.

4.2. STRATEGI

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pembangunan Propinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Strategi disusun berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal daerah. Strategi sebagai pendekatan dasar akan mampu mendorong perubahan pemerintahan secara bermakna. Karena itu, pilihan strategi yang tepat dalam membangun Propinsi DKI Jakarta menjadi sangat penting. Dalam kaitan ini, digunakan 2 (dua) pendekatan implementasi sebagai “titik angkat” pembangunan Propinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Pendekatan partisipatif : Mewujudkan masyarakat kota yang mandiri dan sejahtera melalui proses pemberdayaan, dengan mengedepankan prinsip demokratisasi, kesetaraan dan keberpihakan pada masyarakat.
2. Pendekatan komprehensif, yaitu membentuk struktur ruang kota yang strategis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah/ kawasan, secara berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kedua pendekatan tersebut diimplementasikan secara sinergis, terintegrasi, bertahap dan berkesinambungan.

Strategi merupakan alat penghubung antara Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan dalam satu paket dengan strategi di setiap di setiap bidang pembangunan. Strategi di setiap bidang Renstrada Propinsi DKI Jakarta dapat dilihat dalam setiap bab dari bab 5 hingga bab 12 yang mencerminkan delapan bidang Renstrada Propinsi DKI Jakarta. Strategi dilahirkan dari pengamatan setiap bidang sehingga secara umum bersifat memayungi strategi di setiap bidang pembangunan Propinsi DKI Jakarta. Strategi tersebut meliputi :

1. Menegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelambagaan, meningkatkan kualitas individu aparat, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peraturan, membangun mentalitas penegak hukum yang profesional, jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian, keharmonisan kehidupan hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan yang aman, tertib dan tenteram. (HUKUM dan TRAMTIB).
3. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian, struktur organisasi, dan administrasi pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance* untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. (PEMERINTAHAN)

3. Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan, dan pemanfaatan keuangan daerah yang digunakan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab tercipta melalui sistem pengawasan keuangan yang ketat. (PEMERINTAHAN)
4. Mengembangkan sistem *database* yang bersifat informatif, aktual, dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mencapai terciptanya pembangunan yang berbasis pada profesionalisme, terstruktur, sistematis dan akuntabel. (PEMERINTAHAN)
5. Menciptakan pemerataan pendidikan dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya, terutama pada program pendidikan 9 tahun dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana fisik/ non fisik pendidikan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan swasta.
6. Mengatasi permasalahan sosial seperti penggunaan narkoba, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya yang berpotensi mengganggu jalannya proses belajar mengajar. (PENDIDIKAN SOSIAL)
7. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan dan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kesehatan, agar setidaknya mencapai standar minimum pelayanan kesehatan. (KESEHATAN)
8. Mengembalikan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi Propinsi DKI Jakarta dengan mengembangkan kebijakan yang pro pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan *high cost economy* dan menciptakan sistem pelayanan investasi yang simpel untuk mencapai terciptanya peningkatan investasi di Propinsi DKI Jakarta. (EKONOMI)
9. Mengembangkan usaha-usaha pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. (EKONOMI-TENAGA KERJA)
10. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan sektor-sektor yang non unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-besarnya bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja. (EKONOMI-LINGKUNGAN HIDUP-TENAGA KERJA)

11. Membangun komunikasi antar masyarakat Propinsi DKI Jakarta yang bersifat heterogen dengan memperhatikan akar budaya masing-masing daerah sehinggak seminimal mungkin dapat menekan terjadinya konflik-konflik horizontal. (SOSIAL)
12. Memantapkan arah dan tujuan pembangunan sosial dengan mengoptimalkan peranan pemerintah, swasta dan dukungan masyarakat untuk menghindari terjadinya penurunan moral pemerintah dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. (SOSIAL-AKHLAK)
13. Mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan penduduk serta mengendalikan arus perpindahan penduduk ke DKI Jakarta seperti urbanisasi. (SOSIAL-KEPENDUDUKAN)
14. Meminimalisir dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap daya dukung lingkungan dan sumber daya alam. (SARANA-PRASARANA-LINGKUNGAN HIDUP)
15. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan seperti kemacetan, banjir, pemukiman kumuh, ledakan pedagang kaki lima dan lain-lain. (SARANA-PRASARANA-SOSIAL)



Lampiran 3 Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002- 2007

4.7 Bidang Sosial Budaya

4.7.1 Fungsi Keagamaan

Dalam Renstrada 2002-2007 dinyatakan bahwa masalah Keagamaan, antara lain : belum optimalnya pembinaan kerukunan antar umat beragama; dan belum optimalnya sarana dan prasarana keagamaan.

4.7.1.1 Program, Kegiatan dan Realisasinya

4.7.1.1.1 **Program Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama** dengan prioritas kegiatan antara lain, pembinaan kerukunan antar umat beragama; pembinaan potensi dan bimbingan mental spiritual masyarakat.

Realisasinya antara lain :

- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 2030 Tahun 2004 tentang Dibangunnya Gedung Pusat Kerukunan Umat Beragama di Kelurahan Kota Bambu Selatan.
- Berfungsinya Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKKUB).
- Diadopsinya pendekatan FKKUB untuk diterapkan di Daerah seluruh Indonesia.

4.7.1.1.2 **Program Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan** dengan prioritas kegiatan antara lain, pembinaan dan kemitraaan lembaga keagamaan; pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan; pengadaan buku-buku keagamaan; pembinaan manasik haji bagi masyarakat dan jamaah haji; penyampaian informasi haji daerah; pembinaan petugas haji daerah; terbantunya lembaga sosial keagamaan.

Realisasinya antara lain :

- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 154 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tempat-tempat Ibadah di Provinsi DKI Jakarta.
- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 145 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tempat-tempat Ibadah di Provinsi DKI Jakarta.
- Berfungsinya Jakarta Islamic Center.
- tersedianya peta penyebaran tempat ibadah dan TPA/TKA/TPQ/RA/MD/sekolah minggu;

4.7.2 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Dalam Renstrada 2002-2007 dinyatakan bahwa masalah Kesejahteraan Sosial, antara lain : program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum optimal; belum optimalnya pelayanan pemakaman; dan masih adanya potensi konflik sosial.

4.7.2.1 Program, Kegiatan dan Realisasinya

4.7.2.1.1 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan prioritas kegiatan, antara lain, penyusunan perda terhadap penduduk cacat dan golongan rentan lainnya; pembinaan kesejahteraan anak, remaja, keluarga dan lanjut usia; penanganan masalah tuna susila; dan pembangunan dan rehab sarana prasarana sosial.

Realisasinya antara lain :

- Tersusunya draft Raperda tentang tidak diskriminatif terhadap penduduk cacat dan golongan rentan lainnya.
- Beroperasinya 49 unit UPT panti sosial Dinas Bintal Kesos yang terdiri dari 10 unit panti anak/remaja, 5 panti tresna werda, 1 panti narkoba, 9 panti rehabilitasi cacat, 6

panti rehabilitasi tuna sosial, 2 panti terlantar dan korban tindak kekerasan dan 16 loka bina karya.

- Dilayaninya penghuni panti sosial anak/remaja sebanyak 21.630 orang (2003), 2.410 orang (2004), 5.567 (2005) dan 4.543 orang (2006).
- Dilayaninya secara non panti sebanyak 4.114 orang (2003), 8.772 orang (2004), 3.288 orang (2005) dan 5.199 orang (2006).
- Dilayaninya penghuni panti tresna werda sebanyak 551 orang (2003), 780 orang (2004), 898 orang (2005) dan 909 orang (2006).
- Dilayaninya penghuni panti rehabilitasi cacat sebanyak 1.340 orang (2003), 1.340 orang (2004), 1.475 orang (2005) dan 1.707 orang (2006).
- Dilayaninya penghuni panti terlantar dan korban tindak kekerasan sebanyak 685 orang (2003), 620 orang (2004), 454 orang (2005) dan 650 orang (2006).
- Dilayaninya korban bencana dan musibah lainnya sebanyak 736.708 orang (2003), 20.000 orang (2004), 15.364 orang (2005) dan 13.685 orang (2006).
- Terselenggaranya pelatihan bagi tenaga kerja penyandang cacat sebanyak 243 orang (2003), 240 orang (2004), 330 orang (2005) dan 245 orang (2006).
- Terlaksananya layanan sosial bagi penyandang cacat.
- Terlaksananya layanan sosial bagi keluarga perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.

4.7.2.1.2 Program Peningkatan Peran Serta Sosial Masyarakat dengan prioritas kegiatan antara lain, pelatihan para pekerja sosial; promosi sosial dan solidaritas kesetiakawanan sosial.

Realisasinya antara lain :

- Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) sebanyak 4.573 orang (2003), 4.786 orang (2004), 4.786 orang (2005) dan 4.786 orang (2006).
- Jumlah pengurus BKKS sebanyak 27 orang (2003), 27 orang (2004), 58 orang (2005) dan 58 orang (2006).
- Jumlah pengurus KKKS sebanyak 15 orang (2003), 15 orang (2004), 15 orang (2005) dan 15 orang (2006).
- Jumlah pengurus yayasan sebanyak 4.206 orang (2003), 4.206 orang (2004), 4.105 orang (2005) dan 4.500 orang (2006).
- Jumlah pengurus Pokja Kesuma sebanyak 1.663 orang (2003), 1.780 orang (2004), 1.786 orang (2005) dan 1.788 orang (2006).
- Terselenggaranya pelatihan untuk tenaga sosial, TKSM dan kader berperspektif gender sebanyak 1.580 orang (2003), 1.250 orang (2004), 873 orang (2005) dan 150 orang (2006).

4.7.2.1.3 Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman

dengan prioritas kegiatan antara lain, peningkatan sarana dan prasarana pemakaman, peningkatan kualitas pelayanan pemakaman dan peningkatan fasilitas pelayanan pemakaman.

Realisasinya antara lain :

- Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 2187 Tahun 2004 tentang Penguasaan Peruntukan Bidang Tanah sebagai Tempat Pemakaman Umum Seluas \pm 864.986 m² yang terletak di Kelurahan Kamal dan Kelurahan

Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat.

- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 2318 Tahun 2004 tentang Penguasaan Peruntukan Bidang Tanah sebagai Tempat Pemakaman Umum Seluas ± 701.700 m² yang terletak di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat.
- Beroperasinya 108 tempat pemakaman umum (TPU).
- Terlaksananya layanan pemakaman jenazah sebanyak 25.880 jenazah (2003), 28.664 jenazah (2004), 29.085 jenazah (2005) dan 31.640 jenazah (2006).
- Terlaksananya layanan pemakaman tumpangan sebanyak 2.756 jenazah (2003), 3.103 jenazah (2004), 3.249 jenazah (2005) dan 3.622 jenazah (2006).
- Terlaksananya perpanjangan ijin penggunaan tanah makam (IPTM) sebanyak 75.570 ijin (2003), 74.150 ijin (2004), 77.125 ijin (2005) dan 84.031 ijin (2006).
- Terlaksananya layanan ijin angkut jenazah dalam negeri sebanyak 5.922 jenazah (2003), 6.842 jenazah (2005), 6.645 jenazah (2005) dan 6.928 jenazah (2006).
- Terlaksananya layanan ijin angkut jenazah keluar negeri sebanyak 53 jenazah (2003), 51 jenazah (2004), 81 jenazah (2005) dan 92 jenazah (2006).
- Terlaksananya layanan kremasi/pengabuan jenazah sebanyak 1.285 jenazah (2003), 1.240 jenazah (2004), 1.133 jenazah (2005) dan 1.063 jenazah (2006).
- Terlaksananya layanan angkutan jenazah terlantar/tunawan dari TKP ke RSCM sebanyak 1.358 jenazah (2003), 1.456 jenazah (2004), 1.376 jenazah (2005) dan 1.271 jenazah (2006).
- Terlaksananya layanan angkutan jenazah terlantar/tunawan dari RSCM/Panti ke TPU sebanyak 581 jenazah (2003), 663 jenazah (2004), 706 jenazah (2005) dan 721 jenazah (2006).

- Terlaksananya layanan angkutan jenazah dalam kota sebanyak 608 jenazah (2003), 491 jenazah (2004), 575 jenazah (2005), 458 jenazah (2006).
- Terlaksananya layanan angkutan jenazah keluar kota sebanyak 250 jenazah (2003), 282 jenazah (2004), 308 jenazah (2005) dan 416 jenazah (2006).
- Diberikannya subsidi biaya gali tutup makam sebesar Rp.150.000,- per liang lahat sebanyak 34.280 petak (2005) dan 37.468 petak (2006).
- Tersusunnya Masterplan TPU dan perpetakan makam.

4.7.3 Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Renstrada 2002-2007 dinyatakan bahwa masalah Pemberdayaan Masyarakat, antara lain : Belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat; Program-program yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dirasakan belum optimal; Belum optimalnya penanganan pemberdayaan perempuan.

4.7.3.1 Program, Kegiatan dan Realisasinya

4.7.3.1.1 Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan dengan prioritas kegiatan antara lain, Pelaksanaan pembinaan/pelatihan keterampilan bagi para PMKS; Pelaksanaan penyuluhan bahaya narkoba; Pemberian pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga miskin; dan Pemberian pelayanan pendidikan yang memadai SD dan SLTP bagi warga miskin.

Realisasinya antara lain :

- Ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Anggaran PPMK Bina Ekonomi DKI Jakarta.
- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 1582 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan

Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan gubernur Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 1791 Tahun 2004 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan.
- Kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan secara lintas sektor menjadi lebih terpadu dan sinkron.
- Jumlah penduduk miskin sebesar 3,42% atau 287 ribu jiwa (2002), 3,18% atau 277 ribu jiwa (2004), dan 4,57% atau 407 ribu jiwa (2006).

4.7.3.1.2 **Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan** dengan prioritas kegiatan antara lain, Pelatihan manajemen; Sosialisasi model lembaga Keuangan Mikro; dan Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro.

Realisasinya antara lain :

- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 1561 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003-2007; yang diperbaiki dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Anggaran PPMK Bina Ekonomi DKI Jakarta.
- Ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta.
- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 2025 Tahun 2005 tentang Komite Pembentukan Masyarakat Jakarta.

- Terelesaikannya draft Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro di 267 Kelurahan.
- Jumlah dana PPMK yang disalurkan di Kelurahan sebesar Rp.62,5 milyar (2002), Rp.121,0 milyar (2003); Rp.175,65 milyar (2004); Rp.267,0 milyar (2005) dan Rp.47,2 milyar (2006).
- Jumlah dana PPMK yang disalurkan untuk ekonomi sebesar Rp.58,86 milyar (2002), Rp.71,40 milyar (2003); Rp.101,82 milyar (2004); Rp.157,0 milyar (2005) dan Rp.45,83 milyar (2006).
- Jumlah pemanfaat dana PPMK untuk ekonomi sebanyak 102.725 orang (2002), 91.976 orang (2003), 84.886 orang (2004) dan 66.113 orang (2005).

4.7.3.1.3 **Program Pemberdayaan Perempuan** dengan prioritas kegiatan antara lain, Sosialisasi UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Peningkatan peran perempuan dalam bidang sosial keagamaan, ekonomi, politik dan pemerintahan.

Realisasinya antara lain :

- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Perempuan (TKP3) Provinsi DKI Jakarta.
- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta.

- Kegiatan lintas sektor yang berkaitan jender dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih sinkron dan terpadu.
- Menurunnya indeks kesetaraan kesenjangan jender (IKKJ) buta huruf 3,81 (2002) menjadi 2,61 (2006).
- IKKJ pengangguran terbuka relatif sama, yaitu sebesar 1,40 (2002) menjadi 1,43 (2006).

4.7.4 Fungsi Pelestarian Budaya dan Permuseuman

Dalam Renstrada 2002-2007 dinyatakan bahwa masalah Pelestarian Budaya dan Permuseuman, antara lain : Belum optimalnya pengembangan bidang kesenian dan kebudayaan; Masih kurangnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai daninggalan sejarah dan budaya maupun bagi para pelaku budaya yang mempunyai andil dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan permuseuman.

4.7.4.1 Program, Kegiatan dan Realisasinya

4.7.4.1.1 **Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan** dengan prioritas kegiatan, antara lain, Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Seni Budaya; Peningkatan Kreatifitas dan Kualitas Pelaku Seni Budaya; Peningkatan manajemen pembinaan dan Pelayanan Seni Budaya dan Permuseuman; Peningkatan Informasi dan Promosi Budaya; dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Seni Budaya.

Realisasinya antara lain :

- Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah.

- Ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 106 Tahun 2004 tentang Pedoman Dasar Organisasi Kesenian di Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.
- Bertambahnya regulasi tentang kebudayaan dan permuseuman dari 28 regulasi (2002) menjadi 36 regulasi (2006).
- Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Teater Besar PKJ-TIM.
- Berfungsinya Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM).
- Beroperasinya gedung kesenian Jakarta.
- Berfungsi 5 UPT balai latihan kesenian (BLK).
- Pelestarian benda bersejarah sebanyak 40.543 benda (2003), 40.587 benda (2004), 40.743 benda (2005) dan 40.743 benda (2006).
- Terbinanya organisasi kesenian sebanyak 2.408 organisasi (2003-2006).
- Dikirimnya misi seni budaya ke dalam dan luar negeri sebanyak 5 kali (2003), 8 kali (2004), 11 kali (2005) dan 9 kali (2006).
- Diterbitkannya ijin kegiatan seni budaya sebanyak 161 ijin (2003), 105 ijin (2004), 114 ijin (2005) dan 71 ijin (2006).

4.7.4.1.2 Program Pengembangan museum dan pelestarian peninggalan cagar budaya/sejarah dengan prioritas kegiatan antara lain, Pelestarian dan Pengembangan Museum, Benda Cagar Budaya (BCB) dan Sejarah; Peningkatan Sarana dan Prasarana Museum, BCB dan Lingkungan Cagar Budaya; Peningkatan Informasi dan Publikasi Museum Serta Benda Cagar Budaya.

Lampiran 4 Foto bersama dengan narasumber 28 Agustus 2019



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Lampiran 5 Hasil transkrip wawancara dengan narasumber bapak

Sutiyoso

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai Jakarta saat masih menjabat sebagai pangdam jaya?

Saat menjadi pangdam jaya tentu melihat Jakarta dari aspek keamanan yang merupakan tanggung jawab saya sebagai pangdam jaya. Jakarta sebagai ibukota yang mengemban multifungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, perdagangan, industri, pendidikan, pariwisata. Beban yang sangat banyak itu merupakan sebuah sumber kehidupan bagi banyak orang dan akhirnya menjadi magnet bagi mereka yang tinggal di daerah karena di daerah asalnya dianggap tidak memadai sumber kehidupannya. Akibatnya pendatang baru yang umumnya penyandang masalah sosial yang tidak punya pekerjaan, tidak punya keterampilan, nekat datang ke Jakarta membawa serta anak istrinya dan pada akhirnya menjadi beban di Jakarta

2. Mengapa bapak bisa terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta?

Menjadi gubernur sebenarnya bukan cita-cita saya, ini mungkin sedikit rahasia tapi memang dari latar belakang saya yang dari pasukan elit kopasus yang sudah beroperasi dimana-mana, dilatih diluar dan dalam negeri, banyak sekolah-sekolah dan kursus yang sudah dijalani, tentu saja sebenarnya saya lebih cocok terus ke angkatan. Nah tapi itulah hak prerogratif presiden saat itu. Intinya

pengusulan saya tidak tembuslah walaupun itu hasil dari wancakti dewan pangkat dan jabatan yang tertinggi itu, hasil dari rapat itupun akhirnya digantilah. Dalam posisi seperti itulah lalu pangab memerintahkan saya untuk dicalonkan menjadi gubernur DKI karena pak Soerjadi sudah akan selesai masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta.

3. Bagaimana kondisi jakarta saat masa awal bapak menjabat?

Ada satu keunikan disini saat menjabat gubernur, karena saya menjabat akhir 1997 oktober dilantik, artinya saya dilantik saat masa orde baru. Beberapa bulan kemudian saat saya masih katakanlah adaptasi mengenal pekerjaan gubernur yang sangat kompleks itu, tiba2 terjadi satu peristiwa atau kerusakan yang begitu hebat dijakarta pada mei tahun 1998. Itulah sebenarnya saya mengalami ujungnya orde baru dan awalnya reformasi sampai pak harto lengser dan sebagainya. Jadi saya menjabat saat pemerintahan orde baru itukan jadi pejabat, penguasa, itu powerfull. Seorang gubernur, bupati, walikota dibawahnya atau diatasnya atau diatasnya presiden mau bikin apa juga tidak masalah. Karena partnernya yang namanya DPRD itu ibaratnya tukang stampel saja waktu itu. Pokoknya yg dikehendaki eksekutif ikut saja sudah.

Saya merasakan itu beberapa bulan ya, nah saat masuk reformasi itu menjadi terbalik.anggota dewan itu begitu berkuasa. Saat awal-awal reformasi undang-undangnya memungkinkan dia untuk mengerjai habis kita lah. Benar-benar dia memanfaatkan dan dia tunjukkan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang obyektif. Nah itulah awal saya menjabat. Sudah DPRD begitu kuat, selalu

menjegal rencana-rencana kita, lalu rakyat juga menjadi liar dalam arti sulit untuk dikendalikan. Ibaratnya bertahun-tahun sejak pemerintahan orde lama sampai baru ibaratnya tangan kaki diborgol, mulut di plester kebuka semua, nah reformasikan seperti itu. Jadi demokrasi yang memberikan kebebasan yang sangat luas dan lalu diterjemahkan keliru oleh masyarakat pada awalnya. Seakan-akan bahwa reformasi atau kebebasan itu apa saja boleh. Penjarahan-penjarahan, pembakaran toko dan tempat tinggal pribadi. Tentu saja kondisi itu sangat berat, saat ujung orde baru itu krisis ekonomi terus Mei 1998 krisis politik yang ditandai dengan kerusuhan yang hebat di ibu kota dan kota-kota lain. Lalu berakumulasi menjadi krisis multidimensi termasuk krisis moral dimasyarakat. Itu situasi paling berat.

4. Apa dampak yang paling dirasakan bagi DKI Jakarta setelah terjadinya krisis tersebut?

Kota hancur, para pelaku ekonomi eksodus keluar negeri yang paling dekat ke Singapura. Keadaan selanjutnya ya ekonomi lumpuh bahkan minus 19,47%. Ujungnya apa? ya kita tidak punya duit, karena ibukota ini tidak mempunyai resources seperti provinsi lain yang memiliki batubara, tambang emas seperti di Papua, Aceh punya minyak dan gas. Sedangkan kita kan tidak punya apa-apa. Kita kan hanya bersandar pada pajak. Sedangkan pajak hanya bisa didapat kalau ekonomi tumbuh. Oleh karena itulah APBD Jakarta anjlok, tahun pertama saya menjabat itu hanya 1,7 T tahun 1998. Sementara nilai tukar rupiah kita juga anjlok di angka 15-16rb / USD.

Intinya periode pertama saya itu uang tidak ada, kota hancur, disisi lain pegawai justru bertambah, bisa bertambah karena adanya UU baru yaitu menyerahkan kanwil-kanwil diserahkan kepada provinsi. Jadi akhirnya bertambah yang tadinya sekitar 100rb ditambah 36rb yang namanya padat karya, padat orangnya karyanya kaga dan semua itukan makan gaji. Jadi dari 1,7 T , 1,2T itu sudah habis untuk gaji pegawai. Sisanya untuk kesehatan, pendidikan, apalagi untuk pembangunan kota tidak akan bisa. Pembangunan itukan tergantung anggaran kan, ngga mungkin gratisan mana ada kan.

5. Bagaimana solusi bapak agar kehidupan ekonomi kota dapat bergulir kembali?

Aman dan tertib sentralnya. Jika ekonomi kota bergerak kembali, saya mendapatkan pajak dari itu. Oleh karena itulah tema tahun pertama saya menjabat itu namanya survival, artinya survive. Bagaimana ibukota negara ini bisa tetap dipertahankan sebagai pusat pemerintahan dan semuanya bisa berjalan. Ini ngga mudah, gitu kan. Disini waktu awal-awal kerusuhan itu, dimana orang ngerampokin mobil-mobil dijalan yang mau menuju menuju bandara dirampokin semua, salah korbannya itu adalah salah satu staf kedutaan besar. Akibatnya para duta besar datang ke kantor gubernur mau kabur semua kalo tidak bisa mengatasi . Itulah makanya saya prioritaskan periode pertama adalah mengembalikan keamanan dan ketertiban. Itu mengembalikan keamanan dan ketertiban kan perlu power, pasukan. Aku kan ngga punya pasukan. Nah karena itulah saya sebagai ketua muspida (musyawarah pimpinan daerah) pada masa itu, maka saya ngajak panglima, kapolda untuk bersama-sama memulihkan keamanan. Dan keadaan

yang hiruk pikuk dan tak terkendali itu ternyata bisa kita kembalikan dengan cepat.

6. Bagaimana kelanjutan dari pembangunan Jakarta pasca krisis?

Periode pertama 1997-2002 hanya survival, mengembalikan Jakarta ke kondisi yang stabil yang bisa dilihat di Glodok yang sudah mulai beraktivitas kembali. Saya juga membangun tapi tidak banyak yang kecil-kecilan yang kira-kira terjangkau, misal melakukan penghijauan Jakarta, perbaikan fasilitas umum.

7. Bagaimana pembangunan Jakarta di periode kedua bapak?

Memasuki periode kedua 2002-2007, saya mulai benar-benar memikirkan dan mencari solusi terhadap masalah-masalah krusial yang ada di Jakarta, seperti penanganan terhadap kemacetan yang sudah diprediksi akan menjadi lebih parah di kemudian hari. Jadi sebenarnya masalah-masalah krusial sudah ada blueprintnya masing-masing. Tentu saja semua pekerjaan besar ini tidak mungkin diselesaikan 1 periode gubernur dan harus dilanjutkan gubernur setelah itu.

8. Apa solusi bapak agar kemacetan lalu lintas di Jakarta dapat teratasi?

Tahun 2003 saya merencanakan PTM (pola transportasi makro) ibukota, yang didahului dengan pembentukan tim yang terdiri dari pakar transportasi dan juga studi banding ke berbagai negara terutama ke Amerika Latin yang salah satunya adalah Bogota, Kolombia. Disana penduduknya sangat padat dan semrawut seperti Jakarta tetapi bisa mengatasi. Yang pada akhirnya membuahkan busway, monorail, MRT, ganjil genap yang semuanya diadopsi dari sana.

Rancangan ini yang di rancang oleh pakar itu tadi yang saya yakini menyelesaikan masalah, akhirnya saya rancang suatu perencanaan yang basicnya adalah transportasi massal saling mengakses antar moda transportasi lain dan juga yang paling penting dapat mengakses daerah tetangga, seperti depok tanggerang dan bekasi. Hal ini menjadi penting karena waktu tahun 2003 ada 600.000 kendaraan yang masuk ke Jakarta. Mereka membawa kendaraan masing-masing karena tidak ada alternatif transportasi lain. Oleh karena itu transportasi yang selama ini menjadi momok yang menakutkan, setelah ada konsep itu tadi, modanya ada MRT yang paling besar, terus ada monorail green line yang menghubungkan sentra ekonomi dan bisnis hingga ke senayan. Terus ada busway 15 koridor, ada water way disungai-sungai itu semua terintegrasi, mengakses satu dengan yang lain. Kita bikin MRT yang bisa mengangkut ratusan ribu orang dalam satu jam. Rencana awalnya dibangun dari kota tua ke harmoni masuk Sudirman-Thamrin sampai fatmawati dan stasiun besarnya di LB Bulus, oleh karena itu saya tutup stadion Lebak Bulus dan yang akan sebagai penggantinya adalah stadion BMW sebagai markas Persija. Dari fatmawati terus ke depok sampai ke bogor. Orang depok dan bogor yang selama ini ke jakarta yang mau bisnis, kerja, sekolah parkir distasiun habis itu naik mrt untuk masuk ke jakarta. Dan untuk wilayah bekasi serta tanggerang kita akses dengan monorail yang namanya blue line

9. Mengapa monorail dibangun hingga senayan?

Jika nanti ada pertandingan sepakbola antara persebaya melawan Persija bonek-bonek pada datang, mereka naik kereta, habis itu tidak turun kejalan yang nantinya bisa menyebabkan masalah, langsung pindah ke monorail dan pulangny

pun langsung naik ke monorail tidak turun ke jalan lg. sayangnya salah satu pengganti saya berikutnya membatalkan monorail yang sudah saya mulai bangun itu. Waktu itu kita belum bisa mencari investor karena akibat kerusuhan tahun 98 yang membutuhkan waktu lama untuk recovery agar investor dapat percaya kembali dengan Jakarta. Maka untuk langkah awal saya buat busway.

10. Mengapa busway yang pertama kali di laksanakan dari rencana besar itu?

Karena jika tidak saya mulai maka tidak akan pernah terealisasi. Lalu saya konsultasi dengan pakar dan mendapat jawaban bahwa busway tidak perlu investor. Lalu sebagai starting point dibangunlah busway koridor satu Blok M-Kota 15 Januari 2004 dibuka dan dalam kurun waktu 4 tahun saya bisa menyelesaikan 10 koridor dari total jumlah 15 koridor yang direncanakan, 7 beroperasi dan 3 berupa infrastruktur.

11. Bagaimana dengan penanganan masalah banjir Ibukota?

Saya juga mulai menangani masalah banjir, dengan membuat kajian yang didapati adanya tiga jenis banjir, banjir lokal. Kenapa mudah sekali banjir? Karena 30% tanah dki ada dibawah permukaan laut, maka kalau ada hujan lokal pun banjir. Kita tangani dengan pemasangan pompa2 kita sedot dan dibuang kesungai yang terdekat, lalu kita masukan ke banjir kanal dan dibuang ke laut. Air rob, karena kita ada di pantai dan pantai jakarta rata dengan daratan sehingga mudah terkena rob bila terjadi pasang. Untuk penangannya kita rancang dengan giant wall atau tembok raksasa yang meniru dari Belanda tapi belum terlaksana.

Banjir yang tersulit ditangani adalah yang diakibatkan oleh 13 sungai yang mengalir dari arah selatan ke jakarta. Oleh karena itu dibangunlah banjir kanal timur untuk disambungkan dengan banjir kanal barat yang nanti bentuknya seperti tapal kuda. BKT ini berfungsi sebagai penampung aliran air dari ke-13 sungai untuk langsung dialirkan ke laut lepas. Namun hal ini pun belum cukup, oleh karena itu juga direncanakan di daerah selatan, depok dan di daerah bogor ada situ-situ raksasa, yang berfungsi sebagai pembelok sungai sebelum masuk jakarta. Masuk ke jakarta kita atur dengan pengendali air atau bendungan-bendungan.

12. Mengapa bapak berani menggulirkan kembali wacana mengenai megapolitan?

Tanah di jakarta sangat terbatas, itu sebabnya saya meluncurkan ide megapolitan, penggabungan depok, tanggerang, bekasi, bogor. Penggabungan tata ruang, bukan penggabungan administrasi. Artinya wilayah-wilayah tersebut tetap dibawah administrasi lamanya, tetapi tata ruang dirancang rancang bersama-sama, termasuk juga jaringan transportasi, sampah, kependudukan dalam arti mobilisasi penduduk, banjir. Dan daerah penyangga tersebut yang selama ini hanya mendapat hal negatif dari jakarta nanti akan mendapat keuntungan yang signifikan dari kebijakan ini. Karena setelah megapolitan berjalan, orang tidak akan mengincar jakarta lagi, para pengembang akan mengincar tanah mereka yang luas dan murah, jadi ekonomi mereka akan tumbuh. Tapi semua gagasan ini banyak di kritik dan akhirnya terlupakan.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andika Irawan. Lahir di Jakarta, 11 Januari 1995, anak ketiga dari pasangan Sukari dan Tarmika Pancawati. Bertempat tinggal di Jalan Pintu Air II no.52 RT30 RW02, Gandul Utara, Cinere, Depok 16512.

Penulis menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 04 Pondok Labu tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 85 Jakarta Selatan tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 46 Jakarta Selatan pada tahun 2013, lalu melanjutkan studi di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SBMPTN pada tahun 2013.

Kegiatan yang penulis ikuti selama melakukan pendidikannya sampai jenjang universitas adalah aktif dalam ekstrakurikuler Futsal di SMA dan selama berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, penulis aktif di Gakusi Kitchen Studio. Penulis bisa dijumpai melalui surel di irawanandika30@gmail.com